

KENISCAYAAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN DARING

Oleh: Endang Fatmawati ^{*)}

Era pandemi Covid-19 menjadi kebangkitan teknologi bagi perpustakaan untuk bertransformasi dengan mengajukan penilaian akreditasi maupun re-akreditasi perpustakaan secara daring. Kondisi aktual perpustakaan saat ini belum semua perpustakaan di Indonesia sudah terakreditasi. Hal ini karena memang jumlah perpustakaan yang mengajukan akreditasi masih sangat rendah.

Padahal kebijakan pemerintah jelas sekali bahwa kewajiban akreditasi ini menjadi upaya memastikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, apakah sudah memenuhi standar persyaratan minimal atau belum. Justru dengan regulasi visitasi akreditasi online menjadi lebih praktis dan mudah. Penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dilakukan dengan menggunakan media berbasis komputer, jaringan internet, dan melalui aplikasi daring.

Perpustakaan bisa mengajukan borang beserta dokumen dan data dukung bukti fisiknya secara online. Selanjutnya asesor tinggal melakukan penilaian dan mengajukan pertanyaan secara online dengan memverifikasi instrumen bukti fisik yang telah dikirimkan sebelumnya. Untuk peninjauan lapangan ke perpustakaan pun sangat efisien karena dilakukan secara daring dengan *live streaming*.

Akreditasi perpustakaan secara daring memang menjadi hal yang baru di masa pandemi saat ini. Meski demikian, visitasi akreditasi perpustakaan secara daring di tengah kondisi pandemi tidak menjadi masalah. Saya sebagai tim asesor akreditasi perpustakaan, menghimbau tumbuhnya kesadaran dari pengelola perpustakaan dan lembaga induk untuk mengajukan penilaian akreditasi daring. Apalagi jenis perpustakaan di Indonesia jumlahnya banyak sekali. Ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, serta perpustakaan nasional.

Bahkan data dari BPS (2019) bahwa jenis perpustakaan yang paling banyak jumlahnya adalah perpustakaan sekolah sebanyak 113.541 atau 68,98%. Perspektif dari salah satu asesor perpustakaan Indonesia, Drs. Bambang Supriyo Utomo, M.Lib., juga sangat mengapresiasi dan sangat mendukung komitmen dari pengelola perpustakaan sekolah/madrasah untuk mewujudkan layanan prima dan berkualitas.

Idealnya setiap perpustakaan dapat dikelola sesuai dengan standar nasional pada setiap jenis perpustakaan. Akreditasi menjadi motivator dalam upaya meningkatkan kualitas perpustakaan secara bertahap dan terencana. Sesuai dengan marwahnya, perpustakaan berkontribusi sangat besar dalam membangun masyarakat cerdas yang berpengetahuan. Semakin cerdas masyarakatnya maka akan semakin maju bangsanya. Upaya yang dilakukan tentu melalui ikhtiar kolektif dalam menumbuhkan budaya literasi masyarakat. Literasi wajib dimulai dari entitas terkecil yaitu keluarga.

Indonesia menjadi peringkat ke-2 di dunia sebagai negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak. Namun jumlah perpustakaan di Indonesia yang terakreditasi oleh Perpustakaan RI dalam rentang waktu tahun 2011-2020, baru 2808 perpustakaan dari total 164.576 perpustakaan. Nilai akreditasi bervariasi mulai A, B, dan C. Hasil akreditasi menunjukkan potret di suatu perpustakaan. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai strategi meningkatkan perpustakaan secara berkelanjutan. Hasil survei yang dilakukan oleh Perpustakaan RI bahwa perpustakaan yang sudah terakreditasi dengan predikat nilai A sampai dengan bulan Mei 2021, baru mencapai 965 perpustakaan.

Padahal kini proses visitasi akreditasi perpustakaan tidak harus dilakukan secara fisik tetapi juga bisa secara daring. Persoalannya bahwa belum semua perpustakaan mengajukan *assessment* akreditasi secara daring. Beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa perpustakaan di Indonesia belum mengajukan akreditasi.

Pertama, tidak siap secara psikologis. Hal ini terjadi karena perpustakaan belum memiliki komponen yang lengkap seperti yang tertuang dalam instrumen akreditasi sehingga merasa pesimis jika mengajukan akreditasi. Nilai akreditasi yang tidak maksimal menjadi momok tersendiri. Padahal seharusnya berani mencoba sehingga bisa mengetahui posisi derajat perpustakaan seberapa dan bisa mengevaluasi kekurangannya untuk perbaikan lebih lanjut.

Kedua, kurangnya sarana prasarana berbasis teknologi informasi. Artinya, perpustakaan masih belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaannya sehingga kondisinya tidak sesuai dengan standar perpustakaan yang ideal. Kondisi seperti ini ironisnya banyak terjadi di perpustakaan sekolah/madrasah. Alokasi anggaran yang kurang mendukung menjadi aspek fundamental selain kreativitas dari kepala perpustakaan sekolahnya.

Ketiga, belum adanya pejabat fungsional pustakawan maupun pegawai yang berlatar pendidikan ilmu perpustakaan. Hal ini memang menjadi dilema tersendiri, karena bagaimanapun

faktor SDM menjadi penentu maju mundurnya sebuah perpustakaan. Kondisi demikian menyebabkan mereka cenderung abai dan kurang responsif terhadap perlunya pengakuan formal dari perpustakaan yang dikelolanya.

Jika mengurai keuntungan dari terakreditasinya sebuah perpustakaan tentu banyak sekali. Hal ini misalnya untuk meningkatkan reputasi lembaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perpustakaan, menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan, serta untuk menentukan tingkat pemenuhan karakteristik/kriteria/spesifikasi baku standar nasional sebuah perpustakaan.

Sebagai bangsa Indonesia, wajib bangga karena memiliki Perpustakaan Nasional yang tertinggi di dunia dengan 24 lantai. Hakikat perpustakaan menurut Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada pasal 3 dijelaskan bahwa perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Selanjutnya dasar hukum penyelenggaraan akreditasi perpustakaan tertuang jelas dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 38.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2014 pada pasal 46 dijelaskan bahwa perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk mengajukan akreditasi. Semakin perpustakaan terakreditasi, apapun hasilnya, maka akan semakin besar pula usaha untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan kualitas perpustakaan.

Perpustakaan itu sebagai pusat kemajuan dan pelestarian kebudayaan yang berperan dalam menciptakan generasi SDM yang tangguh, unggul, profesional, kreatif, inovatif, berdaya saing, serta bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pustakawan sebagai pengelola informasi dan sumber ilmu pengetahuan harus mampu jemput bola dengan mengembangkan potensi yang berbasis multiliterasi. Pustakawan sebagai *driving force* memiliki tanggung jawab moral yang kuat dalam merealisasikan akreditasi pada semua jenis perpustakaan.

Aspek kegiatan yang dilakukan oleh para pustakawan mulai proses pengadaan bahan pustaka, pengolahan, pelayanan pemustaka, sampai dengan pemeliharaan, menjadi hal krusial yang membutuhkan keseriusan dalam pengelolaannya. Lankes (2012) menyebutkan bahwa perpustakaan yang buruk hanya membangun koleksi, perpustakaan yang bagus membangun layanan, dan perpustakaan yang hebat membangun komunitas.

Oleh karena akreditasi merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan (LAP-N) yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan, maka membutuhkan kompetensi pengelola perpustakaan. Semua pihak terkait di perpustakaan harus mempersiapkan betul komponen instrumen akreditasi yang terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu: koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan, serta penguat kinerja perpustakaan.

Jadi dapat dikatakan bahwa akreditasi perpustakaan menjadi syarat untuk meningkatkan status kelembagaan perpustakaan. Perpustakaan yang telah terakreditasi menjadi barometer untuk menuju masyarakat yang cerdas menuju Indonesia maju. Semoga timbul kesadaran bagi para pengelola perpustakaan dan pustakawan di Indonesia untuk membangun kualitas perpustakaan ke jenjang yang lebih baik dan lebih profesional melalui akreditasi.

Identitas Penulis:

^{*)} Dr. Endang Fatmawati, M.Si., M.A., wakil Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Provinsi Jawa Tengah.

Tersedia Online di:

<https://retizen.republika.co.id/posts/20511/keniscayaan-akreditasi-perpustakaan-daring>